KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 26/DPRD.LPG/13.01/2016

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Pasal 4 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Berita Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 335);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan :

1. Surat dari Gubernur Lampung Nomor : 188.44 / 574 /03/ 2016, tanggal 16 November 2016 perihal Usulan Rancangan Peraturan Daerah untuk ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017;
2. Surat dari Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Lampung Nomor : 17 / BAPEMPERDA / 13.01 / 2016, tanggal 16 November 2016 perihal Penyampaian Judul Raperda Usul Inisiatif BAPEMPERDA DPRD Provinsi Lampung;
3. Surat dari Komisi I DPRD Provinsi Lampung Nomor : 160/22/13.01/2016, tanggal 21 November 2016 perihal Penyampaian Raperda Tahun 2017;
4. Surat dari Komisi II DPRD Provinsi Lampung Nomor :160/162/Kom. II/13.01/2016, tanggal 24 November 2016 perihal Penyampaian Judul Raperda Komisi II DPRD Provinsi Lampung;
5. Surat dari Komisi III DPRD Provinsi Lampung Nomor : 160/011.a/Komisi III/13.01/2016 tanggal 21 November 2016 perihal Raperda Usul Inisiatif Komisi III DPRD Provinsi Lampung Tahun 2017;
6. Surat dari Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Nomor : 160/58/Kom.IV/13.01/2016, tanggal 24 November 2016 perihal Penyampaian Judul Usulan Raperda Tahun 2017;

7. Surat dari Komisi V DPRD Provinsi Lampung Nomor : 26/Kom.V/13.01/2016, tanggal 19 September 2016 perihal Raperda Usul Inisiatif Komisi V DPRD Provinsi Lampung untuk Prolegda Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 dan Jadwal Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung, 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dan 27 (dua puluh tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Pembahasan Luncuran Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2016.

KETIGA : Perubahan terhadap jumlah dan/atau judul Rancangan Peraturan Daerah serta jadwal pembahasan yang ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga setelah masing-masing pihak saling memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan jumlah dan/atau judul serta jadwal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang akan diusulkan disertai dengan alasan tertentu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 25 November 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA.

Hi.DEDI AFRIZAL,S.KEP.,MH.

Tembusan:
1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kakanwil Hukum dan HAM di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : /DPRD.LPG/13.01/2016
TANGGAL : 25 November 2016.

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2017

NO	JUDUL RAPERDA	PRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bangunan Gedung Hijau	Prakarsa Eksekutif	
2.	Pembentukan dan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Lampung pada PT.Penjamin Kredit Daerah Pemerintah Provinsi Lampung	Prakarsa Eksekutif	
3.	Penanaman Modal	Prakarsa Eksekutif	
4.	Panas Bumi untuk Pemanfaatan secara Langsung	Bapemperda	
5.	Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat adat di Provinsi Lampung	Komisi I	
6.	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	Komisi I	
7.	Sharing Pembiayaan Perlindungan Sumber Air Antara Daerah Penghasil dan Daerah Konsumsi	Komisi II	
8.	Obligasi Daerah	Komisi III	
9.	Zonasi Energi Sumber Daya Mineral	Komisi IV	
10.	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Provinsi Lampung	Komisi V	
11.	Pembentukan Peraturan Daerah.	Prakarsa Eksekutif	Luncuran Propemperda Tahun 2016
12.	Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.	Prakarsa Eksekutif	Luncuran Propemperda Tahun 2016

NO	JUDUL RAPERDA	PRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
13.	Manajemen Pengelolaan Sampah Daerah Provinsi Lampung.	Prakarsa Eksekutif	Luncuran Propemperda Tahun 2016
14.	Penyelenggaraan Usaha Pariwisata	Prakarsa Eksekutif	Luncuran Propemperda Tahun 2016
15.	Penanganan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Prakarsa Eksekutif	Luncuran Propemperda Tahun 2016
16.	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).	Prakarsa Eksekutif	Luncuran Propemperda Tahun 2016
17.	Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.	Bapemperda	Luncuran Propemperda Tahun 2016
18.	Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Anak.	Bapemperda	Luncuran Propemperda Tahun 2016
19.	Perlindungan Asas Kepemilikan Tanah.	Komisi I	Luncuran Propemperda Tahun 2016
20.	Penyelenggaraan Perizinan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung.	Komisi I	Luncuran Propemperda Tahun 2016
21.	Distribusi Gabah di Provinsi Lampung	Komisi II	Luncuran Propemperda Tahun 2016
22.	Kemandirian Pangan	Komisi II	Luncuran Propemperda Tahun 2016
23.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Komisi III	Luncuran Propemperda Tahun 2016
24.	Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Komisi III	Luncuran Propemperda Tahun 2016
25.	Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.	Komisi IV	Luncuran Propemperda Tahun 2016

NO	JUDUL RAPERDA	PRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
26.	Pemulihan, Pengelolaan, Pengendalian Daerah Aliran Sungai	Komisi IV	Luncuran Propemperda Tahun 2016
27.	Ketahanan Keluarga Provinsi Lampung	Komisi V	Luncuran Propemperda Tahun 2016
28.	Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus.	Komisi V	Luncuran Propemperda Tahun 2016
29.	Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Prakarsa Eksekutif	Luncuran Propemperda Tahun 2015
30.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029	Prakarsa Eksekutif	Luncuran Propemperda Tahun 2015
31.	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Lampung Kepada PT. Lampung Jasa Utama	Prakarsa Eksekutif	Luncuran Propemperda Tahun 2015
32.	Perubahan Kedua atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	Prakarsa Eksekutif	Luncuran Propemperda Tahun 2015
33.	Lain – Lain Pendapatan Yang Sah	Komisi III	Luncuran Propemperda Tahun 2015

NO	JUDUL RAPERDA	PRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
34.	Penarikan Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah pada PT. Kawasan Industri Lampung dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Dalam Modal Saham PT. Lampung Jasa Utama.	Bapemperda	Luncuran Prolegda Tahun 2012
35.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Tk. I Lampung Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Lampung Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Lampung.	Bapemperda	Luncuran Prolegda Tahun 2012
36.	Penegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.	Komisi I	Luncuran Prolegda Tahun 2012
37.	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Palau-Pulau Kecil Provinsi Lampung 2014-2034.	Prakarsa Eksekutif	Luncuran Prolegda Tahun 2013

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 25 November 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA

Hi.DEDI AFRIZAL,S.Kep.,MH.

NO	JUDUL RAPERDA	PRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
34.	Penarikan Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah pada PT. Kawasan Industri Lampung dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Dalam Modal Saham PT. Lampung Jasa Utama.	Bapemperda	Luncuran Prolegda Tahun 2012
35.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Tk. I Lampung Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Lampung Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Lampung.	Bapemperda	Luncuran Prolegda Tahun 2012
36.	Penegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.	Komisi I	Luncuran Prolegda Tahun 2012
37.	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Palau-Pulau Kecil Provinsi Lampung 2014-2034.	Prakarsa Eksekutif	Luncuran Prolegda Tahun 2013

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 25 November 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA

Hi.DEDI AFRIZAL,S.Kep.,MH.

RENCANA

JADWAL PEMBAHASAN

PROGRAM PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)

PROVINSI LAMPUNG

TAHUN 2017

KETERANGAN:

1 Tahap FGD Penyusunan NA

Tahap Penyusunan NA

3 Tahap Penyampaian Raperda Dalam Paripurna

Tahap Pembahasan oleh Komisi/Panja

5 Tahap Penetapan Raperda

NO	JUDUL RAPERDA	PRAKARSA	WAKTU PEMBAHASAN																																																KET
			JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JUU				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER				
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1.	Bangunan Gedung Hijau	Prakarsa Eksekutif																																																	
2.	Pembentukan dan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Lampung pada PT.Penjamin Kredit Daerah Pemerintah Provinsi Lampung	Prakarsa Eksekutif															3				4						5																								
3.	Penanaman Modal	Prakarsa Eksekutif																																																	
4.	Panas Bumi untuk Pemanfaatan secara Langsung	Bapemperda																																																	
5.	Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat adat di Provinsi Lampung	Komisi I																																																	
6.	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	Komisi I																																																	
7.	Sharing Pembiayaan Perlindungan Sumber Air Antara Daerah Penghasil dan Daerah Konsumsi	Komisi II							1																2						3			4																		
8.	Obligasi Daerah	Komisi III																																																	
9.	Zonasi Energi Sumber Daya Mineral	Komisi IV																																																	
10.	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Provinsi Lampung	Komisi V																																																	
11.	Pembentukan Peraturan Daerah.	Prakarsa Eksekutif																																																	
12.	Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.	Prakarsa Eksekutif				3			4				5																																						
13.	Manajemen Pengelolaan Sampah Daerah Provinsi Lampung	Prakarsa Eksekutif																																																	

| NO | JUDUL RAPERDA | PRAKARSA | WAKTU PEMBAHASAN | | |

NO	JUDUL RAPERDA	PRAKARSA	WAKTU PEMBAHASAN																																																KET.
			JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER				
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
30.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029	Prakarsa Eksekutif																																																	
31.	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Lampung Kepada PT. Lampung Jasa Utama	Prakarsa Eksekutif																																																	
32.	Perubahan Kedua atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	Prakarsa Eksekutif																																																	
33.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Komisi III																																																	
34.	Penarikan Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah pada PT. Kawasan Industri Lampung dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Dalam Modal Saham PT. Lampung Jasa Utama.	Bapemperda																																																	
35.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Tk. I Lampung Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Lampung Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Lampung.	Bapemperda																																																	
36.	Penegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	Komisi I																																																	

NO	JUDUL RAPERDA	PRAKARSA	WAKTU PEMBAHASAN																																																KET.
			JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER				
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
37	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Palau-Pulau Kecil Provinsi Lampung 2014-2034.	Prakarsa Eksekutif																																																		

KETERANGAN:

- Tahap FGD Penyusunan NA
- Tahap Penyusunan NA
- Tahap Penyampaian Raperda Dalam Paripurna
- Tahap Pembahasan oleh Komisi/Panja
- Tahap Penetapan Raperda

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA,

H. DEDI AFRIZAL, S.Kep.MH.

NO	JUDUL RAPERDA	PRAKARSA	WAKTU PEMBAHASAN																																																KET.
			JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER				
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
37	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Palau-Pulau Kecil Provinsi Lampung 2014-2034.	Prakarsa Eksekutif																																																	

KETERANGAN:

1 Tahap FGD Penyusunan NA

Tahap Penyusunan NA

3 Tahap Penyampaian Raperda Dalam Paripurna

Tahap Pembahasan oleh Komisi/Panja

Tahap Penetapan Raperda

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA,

H. DEDI AFRIZAL, S.Kep.MH.

DAFTAR PERKEMBANGAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

NO.	JUDUL RAPERDA	PRAKARSA	MURNI/ LUNCURAN	KETERANGAN		
				LEGAL DRAFTING	TAHAP PEMBAHASAN TEKNIS	KETERANGAN
1.	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	PRAKARSA EKSEKUTIF	Luncuran Propemperda Tahun 2016	Sudah ada surat Gubernur Lampung Nomor 188.44/22/02/2017 Perihal : Penyampaian Raperda.	**Tahap Pembahasan oleh Pansus**	Ketua Pansus : Hi. Mardani Umar,SH.,MH.
2.	PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA	PRAKARSA EKSEKUTIF	Luncuran Propemperda Tahun 2016	Sudah ada surat Gubernur Lampung Nomor 188.44/22/02/2017 Perihal : Penyampaian Raperda	**Sedang Dalam Tahap Pembahasan oleh Pansus**	Ketua Pansus : Hi. Putra Jaya Umar
3.	HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	BAPEMPERDA	Luncuran Propemperda Tahun 2016	Sudah ada surat Gubernur Lampung Nomor 188.341/2044/03/2016 Perihal : 6 (enam) Raperda Usul Inisiatif DPRD.	**Sedang Dalam Tahap Pembahasan oleh Bapemperda**	Ketua Bapemperda
4.	PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK ANAK	BAPEMPERDA	Luncuran Propemperda Tahun 2016	Sudah ada surat Gubernur Lampung Nomor 188.341/2044/03/2016 Perihal : 6 (enam) Raperda Usul Inisiatif DPRD.	**Sedang Dalam Tahap Pembahasan oleh Bapemperda**	Ketua Bapemperda
5.	PERLINDUNGAN ATAS KEPEMILIKAN TANAH	KOMISI I	Luncuran Propemperda Tahun 2016	Sudah ada surat Gubernur Lampung Nomor 188.341/2044/03/2016 Perihal : 6 (enam) Raperda Usul Inisiatif DPRD.	**Sedang Dalam Tahap Pembahasan oleh Komisi I**	Ketua Komisi I

6.	PENYELENGGARAAN PERIZINAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG	KOMISI I	Luncuran Propemperda Tahun 2016	Sudah ada surat Gubernur Lampung Nomor 188.341/2044/03/2016 Perihal : 6 (enam) Raperda Usul Inisiatif DPRD.	**Sedang Dalam Tahap Pembahasan oleh Komisi I**	Ketua Komisi I
7.	DISTRIBUSI GABAH DI PROVINSI LAMPUNG	KOMISI II	Luncuran Propemperda Tahun 2016	Sudah ada surat Gubernur Lampung Nomor 188.341/2044/03/2016 Perihal : 6 (enam) Raperda Usul Inisiatif DPRD.	**Sedang Dalam Tahap Pembahasan oleh Komisi II**	Ketua Komisi II
8.	KEMANDIRIAN PANGAN	KOMISI II	Luncuran Propemperda Tahun 2016	Sudah ada surat Gubernur Lampung Nomor 188.341/2044/03/2016 Perihal : 6 (enam) Raperda Usul Inisiatif DPRD.	**Sedang Dalam Tahap Pembabasan oleh Komisi II**	Ketua Komisi II
9.	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	KOMISI III	Luncuran Propemperda Tahun 2016	Sudah ada surat Gubernur Lampung Nomor 188.341/21/02/2017 Perihal : 6 (enam) Raperda Usul Inisiatif DPRD.	**Sedang Dalam Tahap Pembahasan oleh Komisi III**	Ketua Komisi III
10.	BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)	KOMISI III	Luncuran Propemperda Tahun 2016	Sudah ada surat Gubernur Lampung Nomor 188.341/21/02/2017 Perihal : 6 (enam) Raperda Usul Inisiatif DPRD.	**Sedang Dalam Tahap Pembahasan oleh Komisi III**	Ketua Komisi III
11.	PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA YANG BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN	KOMISI IV	Luncuran Propemperda Tahun 2016	Sudah ada surat Gubernur Lampung Nomor 188.341/21/02/2017 Perihal : 6 (enam) Raperda Usul Inisiatif DPRD.	**Sedang Dalam Tahap Pembabasan oleh Komisi IV**	Ketua Komisi IV
12.	PEMULIHAN, PENGELOLAAN PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI	KOMISI IV	Luncuran Propemperda Tahun 2016	Sudah ada surat Gubernur Lampung Nomor 188.341/21/02/2017 Perihal : 6 (enam) Raperda Usul Inisiatif DPRD.	**Sedang Dalam Tahap Pembahasan oleh Komisi IV**	Ketua Komisi IV

13.	KETAHANAN KELUARGA PROVINSI LAMPUNG	KOMISI V	Luncuran Propemperda Tahun 2016	Sudah ada surat Gubernur Lampung Nomor 188.341/21/02/2017 Perihal : 6 (enam) Raperda Usul Inisiatif DPRD.	**Sedang Dalam Tahap Pembahasan oleh Komisi V**	Ketua Komisi V
14.	PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS	KOMISI V	Luncuran Propemperda Tahun 2016	Sudah ada surat Gubernur Lampung Nomor 188.341/21/02/2017 Perihal : 6 (enam) Raperda Usul Inisiatif DPRD.	**Sedang Dalam Tahap Pembahasan oleh Komisi V**	Ketua Komisi V
15.	KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)	PRAKARSA EKSEKUTIF	Luncuran Propemperda Tahun 2015	Sudah Naskah Akademik (Sesuai dengan surat Gubernur Lampung Nomor 188.44/390/03/2015 tanggal 18 Agustus 2015, Hal Penyampaian Raperda Kepada Ketua DPRD Provinsi Lampung.	**Sedang Dalam Tahap Pembahasan oleh Pansus**	**Ketua Pansus : Hi. Abdullah Fadri Auli**
16.	PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA PT.LAMPUNG JASA UTAMA	PRAKARSA EKSEKUTIF	Luncuran Propemperda Tahun 2015	Sudah ada Naskah Akademik (sesuai dengan surat Gubernur Lampung Nomor 188.44/1258/03/2015 tanggal 11 Agustus 2015, Hal Penyampaian Raperda Kepada Ketua DPRD Provinsi Lampung.	**Sedang Dalam Tahap Pembahasan oleh Pansus**	**Ketua Pansus : Hi.Toni Eka Candra**
17.	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH	PRAKARSA EKSEKUTIF	Luncuran Propemperda Tahun 2015	Sudah ada Naskah Akademik (sesuai dengan surat Gubernur Lampung Nomor 188.44/1258/03/2015 tanggal 11 Agustus 2015, Hal Penyampaian Raperda Kepada Ketua DPRD Provinsi Lampung.	**Sedang Dalam Tahap Pembahasan oleh Pansus**	**Ketua Pansus : Hi.Toni Eka Candra**

18.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	KOMISI III	Luncuran Propemperda Tahun 2015	Sudah ada Naskah Akademik dan Draft Raperda	**Sedang Dalam Tahap Pembahasan oleh Komisi III**	Ketua Komisi III
19.	PENARIKAN PENYERTAAN MODAL SAHAM PEMERINTAH DAERAH PADA PT.KAWASAN INDUSTRI LAMPUNG DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KE DALAM MODAL SAHAM PT.LAMPUNG JASA UTAMA	BAPEMPERDA	Luncuran Prolegda Tahun 2012	Sudah ada Naskah Akademik dan Draft Raperda	• **Sedang Dalam Tahap Pembahasan oleh Bapemperda.** • **Menunggu Rekomendasi DPRD Kepada Pihak Eksekutif untuk melakukan audit kepada PT Kawasan Industri Lampung**	Ketua Bapemperda
20.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI TK.I LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DARI PERUSAHAAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG	BAPEMPERDA	Luncuran Prolegda Tahun 2012	Sudah ada Naskah Akademik dan Draft Raperda	• **Sedang Dalam Tahap Pembahasan oleh Bapemperda.** ***Menunggu tindak lanjut PT Bank Lampung untuk melakukan pertemuan antara Dewan Direksi PT Bank Lampung dengan DPRD**	Ketua Bapemperda
21.	PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG	KOMISI I	Luncuran Prolegda Tahun 2012	Sudah ada Naskah Akademik dan Draft Raperda	**Sedang Dalam Tahap Pembahasan oleh Komisi I**	Ketua Komisi I
22.	RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014-2034	PRAKARSA EKSEKUTIF	Luncuran Prolegda Tahun 2013	Sudah ada Naskah Akademik dan Draft Raperda	**Telah ada surat Gubernur Lampung No 188.44/574/03/2016 tanggal 16 November 2016 Perihal Usulan Raperda untuk ditetapkan dalam Propemperda Thn 2017**	Ketua Bapemperda

23.	PEMBENTUKAN ORGANISASI TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI LAMPUNG DAN BADAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PROVINSI LAMPUNG	PRAKARSA EKSEKUTIF	Prakarsa eksekutif	Sudah ada Naskah Akademik dan Draft Raperda	Sedang Dalam Tahap Pembahasan oleh Pansus	Ketua Pansus : Hi. Mardani Umar,SH.,MH.
24	POLA TARIFF RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDAR NEGARA HUSADA PROVINSI LAMPUNG	PRAKARSA EKSEKUTIF	Prakarsa eksekutif	Sudah ada draft Raperda	Sedang Dalam Tahap Pembahasan oleh Pansus	Ketua Pansus : Ir. Yandri Nazir,MM.